

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulannya, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di Kota Bengkulu, di mana sosialisasi dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menegakkan ketentraman. Meskipun ada tantangan, seperti kebisingan yang ditimbulkan oleh bengkel di Kelurahan Sukarami, upaya penegakan hukum dan edukasi mengenai pentingnya izin usaha oleh Satpol PP diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses edukasi dan sosialisasi, serta melakukan riset pasar bagi usaha lokal, diharapkan keberadaan bengkel dapat memberikan manfaat positif tanpa mengganggu ketertiban umum, sehingga menciptakan suasana yang lebih tertib dan nyaman bagi seluruh warga.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 di Kelurahan Sukarami menghadapi tantangan dalam mencapai ketentraman masyarakat. Meskipun Satpol PP berupaya menegakkan regulasi, konsistensi dan transparansi pelaksanaan masih kurang, terutama terkait kebisingan dari bengkel yang buka larut malam. Dalam perspektif Siyash Tanfidziyah, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat nyata bagi

masyarakat, serta mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas untuk menciptakan lingkungan yang nyaman.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan adalah peningkatan edukasi dan sosialisasi oleh Satpol PP mengenai pentingnya izin usaha dan ketertiban umum melalui seminar di tingkat kelurahan. Diperlukan juga sistem pendataan untuk mengidentifikasi usaha yang belum mematuhi peraturan serta wadah aspirasi bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Satpol PP sebaiknya menjalin kerja sama dengan DPMPTSP untuk monitoring perizinan, dan pemilik usaha disarankan melakukan riset pasar serta menerima edukasi tentang strategi pemasaran. Langkah-langkah ini diharapkan menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan mendukung keberlangsungan usaha di Kota Bengkulu.

Saran dari hasil penelitian ini adalah agar pemerintah, melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam penegakan hukum terhadap kebisingan yang ditimbulkan oleh bengkel yang beroperasi hingga larut malam di Kelurahan Sukarami. Dialog antara pemerintah, pemilik bengkel, dan masyarakat perlu diperkuat untuk menciptakan solusi saling menguntungkan. Selain itu, penting untuk memiliki mekanisme pengaduan yang mudah

diakses dan melakukan evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan agar ketertiban umum dapat terjaga dengan adil.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-QZainuddin Ali, **Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia** (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 32

QS Al-A'raf : 56

QS An-Nisa': 58

B. Buku

Al-Mawardi. **Al-Ahkam As-Sulthaniyyah**. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.

Arikunto, Suharsimi. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**. Jakarta: Rineke Cipta. 2006.

az-Zuhaili, Wahbah. **Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu**. Jilid 6. Damaskus: Dar al-Fikr. 2004.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Bengkulu Dalam Angka 2023. Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu, 2023.

Danim, Sudar. **Menjadi Peneliti Kualitatif**. Bandung: CV Pustaka Setia. 2002.

Edward, III. *Kebijakan Implementasi*. Terj. Ahmad Rizky. Jakarta: Penerbit Ilmu, 2022.

Edwards III, George C. **Implementing Public Policy**. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press. 1980.

El Faisal, Emil, M.Si; Mariyani, S.Pd., M.Pd. **Filsafat Hukum**. Jakarta: Sekretariat. 2020.

Faisal, Rahman. **Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Ketertiban Umum**. Medan: 2022.

Jhon Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Jakarta; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2016.

Jimly, Asshiddiqie. **Hukum Administrasi Negara**. Jakarta: Sekretariat. 2012.

MD, Mahmud. **Politik Hukum di Indonesia**. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.

Mubarok, Ahmad. **Siyasah Tanfidziyah dalam Kebijakan Publik**. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.

Muhammad, Abdulkadir. **Hukum dan Penelitian Hukum**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.

Nurjana, Siti. **Ketertiban Umum dalam Perspektif Hukum**. Jakarta: Pustaka El-Hidayah. 2020.

Rudi, Hartono. **Peraturan Daerah: Studi Kasus Dan Implementasi**. Bandung: Alfabeta. 2018.

Rusman. **Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru**. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Sanjaya, Wina. **Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran**. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Santoso, Budi. **Manajemen Ketertiban Umum**. Yogyakarta: Andi Offset. 2015.

Silalahi, Ulbert. **Studi Tentang Ilmu Administrasi**. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016.

Sugiono. **Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif**. Bandung: Alfabeta. 2008.

Sukirman, Hartati. **Evaluasi Pembelajaran**. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.

Syarifuddin, Amir. **Pengantar Ilmu Hukum Islam**. Jakarta: Kencana. 2007.

Taimiyah, Ibnu. **As-Siyasah Asy-Syar'iiyyah fi Islah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iiyyah**. Kairo: Dar al-Hadits. 2005.

Terry, George R. *Asas-Asas Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.

C. Jurnal

Ahmad Yani. "Dampak Sosial Usaha Bengkel Terhadap Lingkungan Pemukiman." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*. Vol. 9, No. 1, 2023.

Amir Syarifuddin. *Pengantar Ilmu Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.

Ananda, R., & Wijaya, D. *Dampak Kebisingan Mesin Industri terhadap Kesehatan Masyarakat Perkotaan*. ***Jurnal Kesehatan Lingkungan dan Teknologi***, Desember 2024

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Budi Winarno. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress, 2012.

Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall, 2002.

Hypeabis. (2024, 27 Februari). Makin Bergeliat, Begini Potensi Usaha Bisnis Bengkel Mobil di Indonesia. *Hypeabis.id*

Indah Febriani, Darm Titi., Implementasi PERDA Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu Jakarta," *Journal of Social Politics and Public Administration*," April 2024.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Pemerintah Kota Bengkulu.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Bengkulu: Pemkot Bengkulu, 2008.

Pemerintah Kota Bengkulu. *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum*. Bengkulu: Pemkot Bengkulu, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Wahyudi, D., & Rahmawati, E. *Dampak Kebisingan Bengkel Terhadap Kenyamanan Warga di Area Permukiman Padat*. *Jurnal Lingkungan dan Kesehatan*. (2024)

Wawancara langsung dengan Lurah Sukarami, Kota Bengkulu, pada tanggal 20 Mei 2024.

Wirdati Elya Ismi, Utami Nur Annisa, Muzaqi Lutfi, Sifai Alifah Izzatul' " Identifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Metode Job Safety Analysis (JSA) di Industri Bengkel Farisna, Semarang," *Jurnal Kesehatan Amanah*, 15 Desember, 2024.

D. Skripsi

Gofari Ilham, Implementasi Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Produksi Arang DI Tengan Desa Perspektif Siyasa Tanfidziyah (Studi Kasus di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji), *Fakultan Unuversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1446 H / 2025 M.Meret 2025*.

D. Internet

iNews. (2022, 23 Maret). Otomotif Kembali Tumbuh, Pelaku Bengkel di Indonesia Ikut Menggeliat. *iNews*. diakses pada minggu, 27 juli 2025. jam 22.53
<https://www.inews.id/otomotif/motor/otomotif-kembali-tumbuh-pelaku-bengkel-di-indonesia-ikut->

menggeliat Newsikal. (2024, 16 November). Jumlah Kendaraan di Provinsi Bengkulu Tembus 1,2 Juta Unit.

iNews. (2022, 23 Maret). Otomotif Kembali Tumbuh, Pelaku Bengkel di Indonesia Ikut Menggeliat.

iNews. [<https://www.inews.id/otomotif/motor/otomotif-kembali-tumbuh-pelaku-bengkel-di-indonesia-ikut-menggeliat>]

JDIH Pemerintah Provinsi Bengkulu. (2014). Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. [https://jdih.bengkuluprov.go.id/produk/detail_produk/105-peraturan-daerah-provinsi-bengkulu-nomor-2-tahun-2014-tentang-pemberdayaan-usaha-mikro-kecil-dan-men.html]

Newsikal. <https://www.newsikal.com/jumlah-kendaraan-di-provinsi-bengkulu-tembus-12-juta-unit/>

Program IPOS. (2024, 4 September). Bengkel Sepeda Motor di Indonesia Punya Peluang Emas? *Program IPOS*. [<https://www.programipos.co.id/blog/bengkel-sepeda-motor-di-indonesia/>]

Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (2025, 6 Mei). Satpol PP Melakukan Pengawasan Perizinan terhadap Pelaku Usaha. [<https://satpol-pp.tanjabbarkab.go.id/index.php/2025/05/06/satpol-pp-melakukan-pengawasan-perizinan-terhadap-pelaku-usaha/>]

Visualisas Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri 2024 (<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>) (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses Selasa, 16 September 2025. Jam 15.47

E.Undang-undang

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas dan fungsi sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ini mengacu pada [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

